

**PANTI SOSIAL BINA REMAJA NAIBONAT:
Tantangan Pendidikan Masa Depan
NAIBONAT YOUTHS SOCIAL REHABILITATION CENTRE:
Future Education Programme - Challenge**

Indah Huruswati

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan pelayanan dalam panti sosial bina remaja Naibonat di Kupang, khususnya terkait dengan pembinaan lanjut bagi eks binaannya. Sejalan dengan perkembangan waktu, PSBR Naibonat menjadi media alternatif bagi anak-anak dan remaja putus sekolah menuju dunia kerja. Seandainya program pelayanan ini dapat menghasilkan binaan yang siap kerja, apakah tidak mungkin PSBR menjadi harapan masa depan anak yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Untuk itu sejauhmana kegiatan pembinaan lanjut dilaksanakan dan dipahami, sebagai kontrol output pelayanan panti, maka penelitian terhadap PSBR Naibonat Kupang dilakukan. Tentunya ini dilakukan sebagai masukan bagi lembaga dan sekaligus menjadi bagian penting dari keberhasilan program pelayanan panti terhadap binaannya.

Kata Kunci: Pelayanan, pembinaan lanjut, eks binaan

Abstract

This article discussed the issue of Naibonat Youth Social Rehabilitation Centre (PSBR) in Kupang, more specifically its ex-clients' after care programme. Recently, PSBR Naibonat is one-alternative-way for dropped-out children and teenagers towards the world of work. If the PSBR programme is able to educate its clients to be a ready-to-work person, the dreams of the dropped outs and those unreached by formal education to enter the world labour will come true. Therefore, this study was conducted in order to get a complete picture on the implementation of PSBR aftercare programme, as a control output of the rehabilitation process. The findings are to be used as constructive inputs for the PSBR to enhance its achievements.

Key Words: Services, after care, ex-clients

PENDAHULUAN

Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sumber daya manusia di NTT, tergolong rendah. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang berpendidikan minimal

tamatan SMP/ sederajat sebesar 26,58% dari penduduk NTT yang berjumlah 4,6 juta jiwa. Angka melek huruf penduduk berusia lima tahun ke atas sebesar 83,35%, artinya, 83 dari 100 penduduk berusia lima tahun ke atas yang melek huruf.

* Penulis adalah Peneliti Madya pada Puslitbang Kesos, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos, Kementerian Sosial. Pengalaman penelitian pada Panti-panti Sosial Kementerian Sosial, sejak tahun 1988. Hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dan tulisan dalam Jurnal Ilmiah di Puslitbang Kesos. Email: in_hwati@yahoo.co.id

Sementara itu data dari Komnas Perlindungan Anak (Kompas, 18/3, 2012), menyatakan bila dicermati peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia cukup mengerikan. Perbandingannya adalah sebagai berikut, pada tahun 2006 jumlah anak putus sekolah masih sekitar 9,7 juta anak; namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 % menjadi 11,7 juta jiwa. Tidak ada keterangan dari Komnas Perlindungan Anak, apakah jumlah tersebut merupakan akumulasi data tahun sebelumnya, lalu ditambah dengan jumlah anak-anak yang baru saja putus sekolah. Tapi walaupun jumlah itu bersifat kumulatif, tetap saja terasa sangat memprihatinkan.

Di Nusa Tenggara Timur, sebanyak 19.781 anak usia sekolah yang tidak sekolah, lebih dari 62.000 lainnya tidak mampu melanjutkan sekolah mereka sehingga total ada sekitar 82.000 anak terbengkalai pendidikannya. Sebanyak 930.000 lebih anak usia sekolah saat ini tidak sepenuhnya menikmati pendidikan di sekolah yang jumlahnya diperkirakan sekitar lebih dari 5.502.

Gambaran yang cukup memprihatinkan, remaja yang masih labil dan mencari identitas diri terpaksa putus sekolah; terpaksa meninggalkan teman-temannya yang masih terus bersekolah; dan terpaksa menelan kenyataan pahit sebagai manusia yang gagal dan tereliminasi. Ini adalah permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian.

Data hasil penelitian Lembaga Penelitian Semeru (2008), alasan utama mengapa anak di NTT tidak melanjutkan sekolah ke SMP atau terpaksa putus sekolah adalah masalah akses fisik atau keterpencilan dan akses keuangan. Masalah akses fisik atau keterpencilan berkaitan dengan jarak yang jauh; jalan yang buruk, berbukit, becek, dan kadang harus melewati sungai tanpa jembatan; ketiadaan fasilitas

SMP atau sekolah sederajat yang dekat; dan ketiadaan sarana transportasi. Masalah akses keuangan berkaitan dengan biaya penunjang sekolah dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Biaya penunjang sekolah meliputi biaya-biaya transportasi, pembelian buku, LKS (lembar kerja binaan), peralatan sekolah, seragam, dan uang jajan. Ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi biaya penunjang pendidikan yang mahal tersebut menyebabkan anak merasa malu dan putus sekolah. Di NTT, akses keuangan juga berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua untuk membayar uang denda absen anak yang sudah bertumpuk (Lembaga Penelitian Semeru, 2008).

Angka kemiskinan di provinsi ini merupakan yang terbesar kedua secara nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam laporan bulanan statistik April 2011 jumlah penduduk miskin NTT mencapai lebih dari satu juta jiwa atau lebih dari 23% dari total jumlah penduduknya yang mencapai 4,6 juta jiwa.

Anak tidak mau sekolah juga menjadi persoalan utama mengapa anak tidak melanjutkan ke SMP atau terpaksa putus sekolah. Anak tidak mau sekolah karena ia lebih memilih membantu orang tuanya yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dengan bekerja/mencari uang. Selain itu, ia juga merasa tidak melihat masa depan yang lebih baik dengan melanjutkan sekolah.

Harus diakui fenomena pekerja anak di NTT berkaitan erat dengan tradisi atau budaya membantu orang tua. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak merupakan upaya proses belajar menghargai kerja dan bertanggung jawab selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja. Mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga. Namun demikian, sejalan dengan

perkembangan waktu, fenomena anak yang bekerja, banyak berkaitan dengan alasan ekonomi keluarga (masalah kemiskinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan serta faktor sosial dan lingkungan.

Dari lapangan kerja yang digeluti oleh para pekerja anak, persentase tertinggi adalah pekerja anak di sektor pertanian (85,39%). Sektor ini merupakan "penampung" sebagian besar pekerja anak yang pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Anak-anak yang bekerja di sektor pertanian ini pada umumnya melakukan kegiatan sebagai buruh tani, gembala ternak dan sebagainya. Hal ini cukup beralasan karena memang pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan tidak terlalu menuntut pendidikan yang tinggi sehingga memudahkan mereka untuk bekerja di bidang ini. Meski UU Ketenagakerjaan tidak membenarkan mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun, namun tampaknya masih banyak ditemui kasus-kasus pekerja anak.

Satu peluang yang dapat diberikan Pemerintah dalam upaya memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak-anak yang kurang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikannya adalah dengan proses pembelajaran melalui panti sosial bina remaja. Pendidikan formal memang bukan segala-galanya, dengan kata lain pendidikan tidak hanya didapat melalui pendidikan formal atau yang sering disebut sekolah, tetapi pendidikan juga didapat dalam lingkungan informal yang bersumber dari keluarga, masyarakat dan lingkungan. Panti Sosial Bina Remaja Naibonat memiliki misi mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi remaja di lingkungannya. Melalui pelayanan dengan sistem panti, dianggap sebagai alternatif terakhir apabila fungsi dan peran keluarga ataupun masyarakat tidak mampu memberikan

pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggotanya, terutama remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Selain metode pembelajaran teori, mereka juga menyediakan pelatihan keterampilan menjahit, bordir, salon, komputer, perbengkelan. Tujuan akhir pelayanan semacam ini adalah keberfungsian sosial para binaannya, dalam arti remaja yang telah dididik dalam panti dan setelah keluar, dapat menerapkan ilmunya di masyarakat serta dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memperoleh pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan diri dan keluarganya.

Ada beberapa tahapan pelayanan yang diterima mereka selama mengikuti kegiatan dalam panti, mulai dari tahap pendekatan awal; asesmen; perencanaan program pelayanan; pelaksanaan pelayanan; dan pasca pelayanan. Pada pasca pelayanan, mereka dipersiapkan untuk penghentian pelayanan, rujukan, pemulangan dan penyaluran. Ketika mereka sudah kembali ke masyarakat pun, mereka masih menerima pembinaan lanjut yang merupakan tahap akhir pelayanan dari serangkaian pelayanan yang diterima. Kegiatan ini ditujukan agar para remaja yang telah dibina dapat beradaptasi dan berperan serta di dalam lingkungan keluarga, kelompok, lingkungan kerja, dan masyarakat.

Dari Pembinaan lanjut yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses pelayanan di panti, seringkali mengalami berbagai kendala. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) pada tahun 2009 (Puslitbang Kesos), menunjukkan bimbingan lanjut pada sebagian besar PSBR dilaksanakan terbatas pada eks binaan yang terjangkau oleh anggaran, atau dilakukan bersamaan dengan sosialisasi program lainnya di daerah. Kondisi tersebut terjadi karena pelaksanaan pelayanan belum sepenuhnya

didukung oleh pedoman yang baku sehingga belum seluruh kegiatan dapat terlaksana optimal, yang berujung pada terbatasnya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha terhadap eks binaannya. Oleh karenanya untuk mengetahui sejauhmana kegiatan pembinaan lanjut dilaksanakan dan dipahami, baik oleh petugas PSBR dan eks binaannya, maka penelitian terhadap PSBR Naibonat Kupang dilakukan. Tentunya ini dilakukan sebagai masukan bagi lembaga dan sekaligus menjadi bagian penting dari keberhasilan program pelayanan panti terhadap binaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan berfokus pada pelayanan dalam panti dan pembinaan lanjut kepada eks binaan. Agar data dan informasi lebih akurat, peneliti melakukan kunjungan ke 5 anak eks binaan PSBR untuk juga melihat dan mengamati kerja mereka sebagai wujud keberdayaannya.

a. Remaja Putus Sekolah

Dalam kehidupan masyarakat, setiap anak yang telah memasuki usia sekitar 7 tahun membutuhkan pendidikan, bisa didalam rumah tangga maupun dalam lingkungan yang formal seperti sekolah, kursus atau bahkan dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Pendidikan dapat pula diartikan sebagai sebuah proses timbal balik dari pribadi-pribadi manusia dalam menyesuaikan diri dengan manusia lain dan dengan alam semesta (Khaeruddin, 2003).

Pada hakekatnya, pendidikan menjadi suatu keharusan bagi setiap manusia secara keseluruhan. Anak-anak berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan, baik secara formal, informal maupun non

formal, sehingga pada gilirannya ia akan memiliki mental, akhlak, moral dan fisik yang kuat serta menjadi manusia yang berbudaya tinggi dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

Apabila karena suatu sebab, baik terpaksa atau tidak, anak pada akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikannya, dalam arti putus sekolah. Hal ini menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian berbagai pihak. Pengertian putus sekolah adalah seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan baik itu pada tingkat SD, SMP, maupun SMA untuk belajar dan menerina pelajaran tetapi tidak sampai tamat atau lulus kemudian mereka berhenti atau keluar dari sekolah.

Pengertian putus sekolah dapat pula diartikan sebagai *Drop-Out* (DO) yang artinya bahwa seorang anak didik yang karena sesuatu hal, bisa disebabkan karena malu, malas, takut, sekedar ikut-ikutan dengan temannya atau karena alasan lain sehingga mereka putus sekolah ditengah jalan atau keluar dan tidak lagi masuk untuk selama-lamanya. (Bangong Suyanto et al, 2001). Remaja yang mengalami putus sekolah, apabila tidak dibantu cenderung mudah terkena resiko, karena tidak dapat memperkirakan hasil dari perbuatannya. Remaja membutuhkan dukungan untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuannya dengan cara memberikan kesempatan bagi pilihan hidup yang positif (Stephens, 1997, dikutip dari Du Bois & Miley, 2005).

Menurut Bernard (1992), remaja putus sekolah sebagai orang yang rentan memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan kompetensi sosial, keterampilan

memecahkan masalah, kemandirian dan suatu sikap memiliki tujuan hidup serta pandangan tentang masa depan (dikutip dari Du Bois & Miley, 2005).

Pendidikan formal memang bukan segala-galanya. Memang dalam kenyataan yang umum, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peluang bekerja, posisi di bidang kerja, tingkat salary dan fasilitas yang dapat dinikmati; menentukan pula terhadap perilaku individu dalam rumah tangga, serta tanggung jawab sosialnya. Banyak hasil penelitian menunjukkan terutama di Indonesia, pendidikan formal tidak menjadi faktor determinan.

Dari data penduduk tentang angka putus sekolah di Indonesia, terlihat sangat memprihatinkan. Dampak langsungnya, banyak ditemui pengamen cilik dan usia remaja bertebaran di jalan-jalan di seluruh wilayah negeri ini. Tidak hanya di kota-kota besar, mereka hadir sampai di desa-desa dan menyebarkan gangguan dan kecemasan.

Memang kadang-kadang 'bekerja apa saja' merupakan pesan yang jelas, meski sengaja disampaikan secara samar. Artinya, dalam rangka '*berjuang untuk hidup*' atau demi melanjutkan gaya hidup yang terlanjur konsumtif bagi sebagian orang; bisa saja pada akhirnya, mereka menjadi pedagang asongan, pengamen, pengemis, kuli panggul, pencopet, pengedar narkoba; atau menjadi pembantu rumah tangga, kawin di usia dini atau menjadi pelacur muda. Ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi.

b. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Remaja

Pelayanan rehabilitasi sosial remaja adalah proses/bantuan pertolongan yang dilakukan secara terarah, terencana dan sistematis kepada remaja yang menjamin

dirinya berkemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai atas dasar profesionalisme (Kepmensos RI No 106/HUK/2009 Pasal 22). Pelayanan tersebut mencakup bimbingan sosial, psikososial, mental, fisik dan bimbingan keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan masalah. Remaja dalam hal ini diartikan sebagai warga Negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang berusia antara 15 s/d 18 tahun karena faktor tertentu mengalami putus sekolah SD, SLTP, SLTA dan terlantar. Anak Terlantar, adalah anak yang berusia antara 15 s/d dibawah 18 tahun yang karena beberapa kemungkinan seperti kondisi miskin/tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orangtuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kementerian Sosial mempunyai peran cukup strategis dalam upaya pemberdayaan remaja ini dengan memfungsikan lembaga pelayanan sosial yang sudah ada. Permasalahannya adalah apakah Kementerian Sosial telah memiliki segala perangkat yang diperlukan untuk pemberdayaan remaja dengan segala aspeknya, baik dari sisi kesiapan SDM, sarana dan prasarana serta program pengembangannya. Salah satu program pelayanan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk membantu remaja yang mengalami putus sekolah adalah melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR).

Pakar kesejahteraan sosial menyatakan bahwa rehabilitasi sosial mencakup

beberapa fokus kegiatan, yaitu pelatihan vokasional (kerja), konseling vokasional, penyesuaian psikologis, perbaikan fisik dan medis serta penempatan kerja (Zastrow, 2003). Walaupun rehabilitasi sosial di suatu panti sosial telah menetapkan fokus kegiatan tertentu, tetapi dapat juga melakukan kegiatan lain, misalnya mengkombinasikan pelatihan vokasional dengan penyesuaian psikologis. Panti sosial bina remaja dilihat dari sudut tugas dan fungsinya memiliki fokus kegiatan rehabilitasi vokasional.

Menurut Du Bois & Miley (2005), tujuan utama dari rehabilitasi vokasional adalah meningkatkan kemampuan klien untuk bekerja, terutama bekerja secara mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu perencanaan rehabilitasi yang efektif seharusnya dapat menggerakkan partisipasi klien dalam semua aspek pembuatan keputusan serta memberikan kesempatan kepada klien agar lebih mandiri, tidak lagi tergantung pada orang lain. Secara profesional, upaya ini diharapkan menghasilkan eks klien yang memiliki kemampuan dan kemandirian serta berkembang secara wajar dalam masyarakat dan terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial baru, sehingga mereka dapat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Masalah mendasar dalam proses rehabilitasi, menurut Rusalem & Malikin (1981), adalah asesmen yang tepat terhadap keterampilan vokasional klien, penyesuaian diri dan semua potensi yang dimiliki klien. Apabila asesmen pada ketiga aspek tersebut tidak akurat, maka rehabilitasi tidak dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (dikutip dari Zastrow, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penerimaan Menjadi Binaan PSBR Naibonat

Untuk merekrut remaja menjadi binaan PSBR, dilakukan serangkaian kegiatan yang diawali oleh sosialisasi program atau penyebarluasan informasi umum tentang PSBR kepada masyarakat dan instansi terkait, serta informasi tentang persyaratan menjadi binaan PSBR Naibonat. Tidak mudah memperoleh calon binaan sesuai dengan kriteria, dan inisiatifnya amat sulit bila dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten sendiri, karenanya lembaga ini berkoordinasi dengan kelurahan/desa untuk mencari calon binaan. Bagi calon binaan pun ada prosedur yang harus dilakukan sebelum masuk PSBR, diantaranya harus melengkapi persyaratan administratif dan direkomendasikan oleh kelurahan/desa, yang utama adalah persyaratan ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pendidikan lanjutan bagi putra-putrinya. Masih banyak penduduk miskin di wilayah provinsi NTT ini yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut data statistik (BPS, 2009), desa Naibonat yang berpenduduk sejumlah 9.649 jiwa (4.990 laki-laki dan 4.659 perempuan) dengan luas wilayah 22,47 km², memiliki rumahtangga miskin cukup banyak yaitu ada sejumlah 1.101 rumahtangga miskin. Sebenarnya, anak-anak bukannya tak mau bersekolah lebih tinggi. Namun, lebih karena keadaan orangtua mereka yang sebagian besar buruh perkebunan/pertanian itu tak cukup membiayai sekolah. Hal ini juga diakui oleh sebagian besar anak binaan PSBR Naibonat. Pada akhirnya mereka mencari alternatif usaha untuk menambah pengetahuan sebagai bekal terjun ke masyarakat.

Penerimaan binaan di PSBR Naibonat harus melalui beberapa prosedur dan lolos seleksi dengan berbagai persyaratan. Menurut para eks binaan yang sempat dikunjungi peneliti, mereka diinformasikan dari kelurahan bahwa PSBR Naibonat meminta beberapa anak untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan di panti. Untuk mengikuti bimbingan tersebut, mereka harus melengkapi beberapa persyaratan administratif, diantaranya surat tidak mampu dari kelurahan, surat keterangan dari orangtua, surat kesehatan, rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten setempat, dilengkapi dengan ijazah dan surat permandian atau akte kelahiran.

Hal ini diakui oleh salah seorang pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Soe, yang mendampingi peneliti ketika berkunjung ke eks binaan. Dia mengatakan bahwa memang sebelum perekrutan calon binaan, PSBR telah melakukan kegiatan, diantaranya pengiriman surat kepada Dinas Sosial kabupaten sekaligus sosialisasi dan informasi tentang pelayanan sosial panti, panti juga memberikan *leaflet* dan pemasangan spanduk penerimaan calon binaan. Kemudian setelah calon binaan dari desa terseleksi di Dinas Sosial Kabupaten, panti sekali lagi mengidentifikasi calon penerima pelayanan ini apakah telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Baru setelah itu, baik Dinas Sosial maupun panti melakukan pemberian motivasi kepada calon penerima pelayanan dan masyarakat dimana calon binaan bertempat tinggal.

Satu tahun dua kali dilakukan pengiriman calon binaan ke PSBR, yaitu bulan Januari mengantar anak-anak calon binaan dan bulan Juni selesai dibina. Kemudian pada bulan Juli mengirim kembali anak-anak

untuk angkatan kedua dan berakhir di bulan Desember di tahun yang sama.

PSBR Naibonat mempunyai jangkauan hingga seluruh wilayah Indonesia Timur, tetapi dalam kenyataannya anggaran untuk merekrut seluruh wilayah tersebut tidak cukup memadai. Untuk wilayah sekitar provinsi NTT pun dengan jumlah 22 kabupaten tidak cukup terjangkau.

Pengalaman Nur, eks binaan PSBR Naibonat dari Kota Soe, ketika awal masuk panti memang memerlukan upaya tidak mudah. Ia masuk ke panti pada bulan Januari hingga Juni tahun 2009 dan selesai mengikuti bimbingan keterampilan, diberi '*Toolkit*' sebagai modal bekerja di masyarakat.

Begitu mendengar informasi dari kantor Dinas Sosial, dia langsung melengkapi persyaratan yang diminta. Memang tidak mudah karena usianya ketika itu 25 tahun, seharusnya ini sudah tidak masuk seleksi. Waktu itu keinginannya sangat kuat untuk memperoleh keterampilan menjahit. Dia tertarik dengan pendidikan yang diberikan PSBR dan keinginan membuka usaha menjahit, menguatkan niat untuk mendaftar ke kantor kelurahan. Sementara pada waktu itu keluarganya tidak mampu membiayai kursus tambahan. Agar diterima dan lolos seleksi, ia menggunakan ijazah SMP, meskipun waktu itu dia sudah menamatkan SMA-nya.

Beberapa prosedur diikutinya, dari tahapan administratif dengan mengisi formulir dan memenuhi beberapa surat keterangan yang diminta, hingga wawancara. Akhirnya setelah menyelesaikan semua prosedur yang diminta, dan berkat keinginan yang kuat untuk memperoleh pendidikan tambahan secara gratis, Nur

diterima sebagai binaan PSBR tahun 2009. Ia diharuskan tinggal di asrama selama 6 bulan. Keterampilan yang diterima adalah menjahit, sebagai bimbingan keterampilan yang utama. Sedangkan bimbingan tambahannya adalah memasak (tataboga), bimbingan mental, olahraga. Ada jadwal untuk setiap kegiatan. Nur menganggap kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh panti sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk bekal membuka usaha menjahit. Di panti ia diberi motivasi untuk bekerja.

Banyak ilmu yang ia terima, sehingga begitu keluar dari panti, dimana sebelumnya tidak bisa menjahit, kini menjadi bisa membuka usaha menjahit sendiri. Setelah keluar dari panti, ia sempat magang di tempat menjahit pakaian. Kegiatan ini tidak terkait dengan panti. Ia bekerja dengan orang yang masih ada hubungan keluarga, yang berada di sekitar tempat tinggalnya di Soe. Selama magang di tempat itu, ia tidak digaji hanya diberi makan setiap hari. Yang ada dalam benaknya ketika itu adalah ia mampu membuka usaha jahit sendiri kelak. Kegiatan magang ini dianggap sebagai pembekalan bagi usahanya yang memang sudah menjadi cita-citanya sebelum masuk panti. Ia sempat mengikuti magang selama 8 bulan. Setelah itu, ketika ia merasa sudah cukup mampu untuk mandiri, ia mencoba untuk membuka usaha sendiri. Usianya ketika itu 25 tahun dan sudah keluar dari SMA.

Memang menurut petugas Dinas Sosial, setelah calon binaan melengkapi persyaratan yang diminta, semua surat keterangan dan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dikirim ke PSBR Naibonat untuk diseleksi. Kriteria umur yang harus dipenuhi yaitu dari 12 tahun hingga 20 tahun. Tetapi sewaktu Nur masuk, dia sudah berusia 25 tahun. Ini dianggap pengecualian oleh panti karena ada

motivasi kuat untuk memperoleh pelatihan yang diberikan panti. Dia mempunyai kemauan untuk mengembangkan dirinya. Agak berbeda jika yang diterima adalah anak-anak yang sama sekali tidak memiliki kemauan untuk berkembang. Salah seorang petugas Dinas Sosial Kota Soe, yang mendampingi peneliti ketika berkunjung ke eks binaan, mengatakan, dari pengalaman mengurus dan menseleksi calon-calon binaan PSBR, mereka yang tidak memiliki kemauan untuk belajar, pasti tidak bisa menyelesaikan masa pendidikannya di asrama. Biasanya baru seminggu di panti (masa orientasi), dia sudah minta kembali ke keluarganya atau bahkan ada yang melarikan diri. Oleh karena itu menurut petugas, agak sulit mencari calon binaan yang benar-benar memiliki kemauan untuk mengembangkan dirinya.

2. Visi dan Misi PSBR Naibonat

Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan. (Kepmensos RI No 106/HUK/2009 Pasal 22). Panti Sosial Bina Remaja Naibonat (PSBR) adalah salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial RI, yang secara fungsional bertugas memberikan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar putus sekolah yang berada di wilayah Indonesia bagian Timur yang meliputi Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), NTB, Bali, Maluku dan Irianjaya/Papua.

UPT Bina Remaja Naibonat didirikan tahun 1979 dengan nama Panti Penyantunan Anak (PPA) dan secara resmi beroperasi pada tahun 1980. Pada tahun 1988 PPA diganti menjadi Sasana Penyantunan Anak (SPA) sesuai surat keputusan Menteri Sosial RI. No. 6/HUK/1988. Kemudian pada 23 April 1994 SPA berubah nama menjadi UPT Bina Remaja Naibonat Kupang, sesuai surat keputusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/1994, tentang perubahan UPT/Panti/Sasana di lingkungan Departemen Sosial RI. UPT Bina Remaja (PSBR) Naibonat Kupang diklasifikasikan sebagai panti tipe C.

Pada tahun 2000 ketika Departemen Sosial RI berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) kepemilikan UPT Bina Remaja (PSBR) juga beralih kepemilikan menjadi milik BKSN sekaligus menjadi Panti Percontohan. Perkembangan selanjutnya, tahun 2003 sesuai Kepmensos RI No. 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan tata kerja UPT Bina Remaja di lingkungan Departemen Sosial maka PSBR Naibonat diklasifikasi menjadi Panti tipe B eselon III/b dan sejak 2009 berdasarkan Kepmensos RI No. 106/HUK/2009 berubah menjadi eselon III hingga kini.

Sesuai visinya PSBR Naibonat Kupang bercita-cita mewujudkan citra dan kreatifitas berkarya bagi remaja menuju kemandirian dan kesetaraan. Sementara itu beberapa misi yang diemban, yaitu menciptakan lingkungan panti yang ASRI (Aman, Sehat, Ramah, Indah dan Religius); menjalin relasi yang baik dengan seluruh sistem sumber dan potensi bagi pemberdayaan remaja; meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja putus sekolah terlantar; meningkatkan profesionalisme,

etos kerja dan moral pelayanan yang mengakar pada profesi pekerjaan sosial; menjadikan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Naibonat sebagai solusi handal dalam program pengentasan masalah remaja putus sekolah terlantar.

3. Sarana PSBR Naibonat

PSBR Naibonat memiliki luas area sekitar 7 ha yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang berasal dari sumber dana operasional APBN, yaitu terdiri dari 1 unit gedung kantor, 1 unit gedung konsultasi, 1 unit gedung lab komputer, 1 unit gedung showroom, 14 unit asrama, 3 unit gedung keterampilan (otomotif/bengkel, menjahit, pertukangan), 1 unit gedung/ ruang kelas, gedung Aula, 1 unit gedung wisma tamu, poliklinik, sarana ibadah, dapur umum dan ruang makan, rumah negara yang diperuntukan sebagai rumah dinas, 1 unit gudang dan pos jaga.

Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki panti masih relatif terawat dan layak pakai. Hanya saja untuk beberapa peralatan keterampilan pada jurusan keterampilan tertentu seperti montir, menjahit dan tata rias terlihat alat-alat praktiknya usang atau tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, diantaranya untuk praktik sepeda motor yang masih menggunakan buatan tahun lama. Hal ini dibenarkan oleh instruktur sendiri bahwa sebagian sarana praktek seperti sepeda motor masih menggunakan tahun lama.

Kondisi sarana dan prasarana tersebut ditopang oleh minimnya dana operasional PSBR yang bersumber dari APBN melalui Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Pada prakteknya, dana tersebut dialokasikan untuk semua

pos-pos belanja pegawai, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana panti, administrasi perkantoran dan pengadaan ATK, kegiatan sosialisasi dan seleksi, pelayanan dan bimbingan termasuk kegiatan keterampilan binaan, hingga biaya makan dan pakaian anak. Karena itu dana tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan revitalisasi alat-alat praktik untuk jenis keterampilan tertentu yang membutuhkan *up-dating* sesuai perkembangan zaman.

4. Pelaksanaan Pelayanan di PSBR Naibonat

Proses pelayanan dalam panti, diawali dengan pengisian formulir oleh calon binaan saat pendaftaran dan registrasi pencatatan calon binaan. Formulir ini berisi identitas, latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi keluarga, tujuan masuk panti, jurusan keterampilan yang dipilih dan data-data lainnya. Selain pengisian formulir, calon binaan juga menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi seperti KTP, ijazah dan kelengkapan persyaratan lainnya. Berdasarkan formulir yang telah diisi, pekerja sosial atau petugas panti melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang ditulis, dan sekaligus memperhatikan kondisi fisik calon binaannya.

Hasil seleksi seluruh calon binaan dibahas dalam pertemuan panitia seleksi untuk menentukan calon binaan definitif. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan calon binaan bisa diterima sebagai anak asuh/calon binaan di PSBR Naibonat adalah :

- 1) Tingkat pendidikan calon binaan
- 2) Usia calon binaan
- 3) Kelengkapan administrasi calon binaan
- 4) Minat dan bakat calon binaan
- 5) Jurusan yang dipilih calon binaan yang

disesuaikan dengan kuota yang ada

Sebenarnya jangkauan layanan panti ini sampai ke seluruh wilayah Indonesia Timur, tetapi karena anggaran tidak mencukupi akhirnya hanya mampu melakukan jangkauan hingga pulau-pulau di wilayah NTT saja, diantaranya pulau Sumba. Seluruh wilayah jangkauan ada 22 kabupaten.

Menurut Kasie Rehsos: *“Kita sudah minta kepada kementerian menambah alokasi anggaran untuk memberi pelayanan kepada anak-anak dari wilayah timur. Anggaran yang ada sekarang ini hanya cukup untuk menjangkau 75 anak (sejak th 1999) itupun hanya anak-anak dari NTT saja. Dan kami juga sudah lama meminta agar bisa menerima jumlah penerima manfaat lebih dari 75 anak dalam setiap angkatan, tapi tidak pernah bisa terealisasi. Memang anggaran sudah menggunakan standar biaya khusus (SBK), jadi penghitungan jumlah penerima manfaat dan jangkauan wilayah sudah dapat diprediksi sejak penyusunan anggaran di awal tahun anggaran. Kapasitas daya tampung panti, termasuk tenaga pengajar sebenarnya sudah siap untuk menerima layanan sejumlah 100 anak. Luas pantinya sendiri ada sekitar 7ha, jadi tidak masalah dengan sarana yang telah ada”*.

Kegiatan asesmen menghasilkan identifikasi sejumlah permasalahan calon binaan yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pelayanan. Selain itu hasil asesmen juga digunakan sebagai bahan pertimbangan menentukan jenis keterampilan dan penempatan binaan dalam asrama. Dari catatan data binaan yang ada, umumnya menunjukkan mereka berasal dari keluarga kurang mampu dan atas dasar keinginan sendiri, ingin memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan

kerja. Memang dalam penentuan jenis keterampilan diharapkan sesuai dengan bakat dan minat anak, sepanjang kuota masih memungkinkan namun dalam kenyataan, pengetahuan yang diperoleh di panti tidak dapat digunakan eks binaan ketika ingin mengembangkan usahanya di tempat tinggal karena berbeda situasi dan kondisinya. Misalnya anak tidak mungkin mengembangkan usaha komputer di tempat tinggalnya yang jauh dari kota, yang listrikpun tidak ada; atau usaha menjahit, sementara tempat tinggalnya jauh dari tetangga dan ketika bergabung membuka usaha dengan beberapa teman dari desa yang sama, lokasinya pun sangat jauh. Faktor jarak dan kebutuhan pelayanan tampaknya tidak dipertimbangkan oleh panti ketika menentukan jenis keterampilan kerja yang akan diberikan kepada binaannya. Sedangkan penempatan binaan dalam asrama di panti diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan anak yang berasal dari satu daerah atau satu etnis yang sama.

Sesuai dengan tujuannya, PSBR Naibonat menerima binaan dengan kriteria remaja putus sekolah terlantar dengan batasan usia sekitar 15 hingga 18 tahun dan menerima rujukan dari lembaga lain, dalam arti dari panti asuhan anak, rumah singgah, lapas anak, RPSA dan sebagainya. Dari satu kasus binaan yang diceritakan di atas (kasus Nur), terlihat bahwa panti mengabaikan kriteria usia dalam menentukan calon binaan. Kriteria lainnya yang juga penting adalah anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; mampu latih dan mampu didik (bukan tuna) serta tidak cacat.

Untuk angkatan I kegiatan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga tanggal 30 Juni. Angkatan II dimulai tanggal

1 juli hingga tanggal 30 Desember. Setiap angkatan jumlah binaan ada 75 orang. Untuk bulan Desember, masa akhir kegiatan, kadang-kadang juga tidak pas waktunya. Melihat situasi dan kondisi, pernah juga tanggal 27 Desember harus diakhiri, karena ketika anak-anak angkatan pertama belum keluar, sudah masuk angkatan berikutnya.

Hasil asesmen anak disimpan dalam file dan diserahkan kepada pekerja sosial atau petugas panti sebagai bahan dasar untuk perencanaan pelayanan. Sesuai dengan hasil asesmen ini, pekerja sosial bersama pejabat struktural menyusun rencana pelayanan selama 6 bulan ke depan yang meliputi jenis kegiatan, jadwal kegiatan dan petugas yang melaksanakan kegiatan. Jenis kegiatan yang disusun meliputi: pelaksanaan orientasi, pelaksanaan bimbingan sosial, kegiatan ekstra kurikuler, pemagangan dan pasca pelayanan. Perencanaan pelayanan ini disusun oleh seksi Rehabilitasi Sosial PSBR Naibonat, sedangkan pelaksanaan kegiatan melibatkan tenaga dari dalam dan luar panti.

Masa orientasi merupakan tahap pengenalan program, kegiatan, petugas dan lingkungan panti kepada calon binaan. Kegiatan ini diisi dengan ceramah-ceramah dari kepala panti, kepala seksi/Sub bag TU, instruktur dan pekerja sosial yang ada di panti. Dalam masa orientasi ini juga diisi dengan pembinaan fisik dan disiplin oleh Kepolisian Sektor Kupang, ceramah tentang kesehatan dari Rumah sakit/Puskesmas Kecamatan dan Badan Narkotika Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan agar binaan mengenal petugas dan program panti sekaligus untuk melatih kedisiplinan binaan. Kegiatan orientasi ini dilakukan selama seminggu sebelum kegiatan formal dilaksanakan.

Menurut petugas, pada masa orientasi ini, seringkali terjadi binaan ingin kembali ke rumah atau bahkan ada yang secara diam-diam kembali ke daerah asalnya. Kejadian ini cukup menyulitkan bagi panti, karena panti sudah diserahkan tanggungjawab membina anak-anak mereka oleh keluarga dan Dinas Sosial kabupaten yang mengirim mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu hal terhadap diri binaan, panti sulit mempertanggungjawabkannya. Beberapa kasus, anak yang melarikan diri tersebut berhasil dikembalikan ke panti dan ada juga yang diinformasikan sudah sampai ke daerah asalnya. Untuk menggantikan posisi binaan yang melarikan diri tersebut, panti harus mencari binaan pengganti. Hal ini bisa diperoleh dari dinas sosial kabupaten yang sama dengan asal binaan atau apabila panti kesulitan mencari binaan apalagi waktu pemberian kegiatan sudah mendesak, sebagai gantinya dicari binaan yang tinggal di sekitar panti, tentunya dengan memenuhi kriteria/persyaratan yang sudah ditentukan. Lagi-lagi persoalan mengejar target/kuota binaan.

Sesuai masa orientasi, binaan menjalani masa bimbingan setiap hari dari pagi jam 8.00 sampai dengan jam 13.00. Dari pagi mereka melaksanakan kegiatan fisik diantaranya senam pagi, olah raga dan gotong royong. Kegiatan olah raga antara lain volly ball, futsal, sepak takraw, tenis meja dan bulu tangkis. Kegiatan ini dibimbing oleh petugas dari dalam dan luar panti dengan tujuan membentuk fisik binaan menjadi sehat dan bugar.

Bimbingan keterampilan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dari jam 09.00-12.45 (3,75 jam). Jenis keterampilan yang diberikan dibedakan atas dua jenis keterampilan. Keterampilan

pokok, meliputi: menjahit, pertukangan kayu/mebeleir, dan otomotif. Sedangkan keterampilan penunjang, meliputi: pertukangan batu, las listrik dan las karbit, tata rias dan tata boga, pertanian, elektro dan ukir. Bimbingan keterampilan dilakukan dalam bentuk teori di kelas dan praktek. Kegiatan ini diakhiri dengan magang kerja yang disebut Praktek Belajar Kerja (PBK) selama 1 bulan menjelang akhir pelayanan di perusahaan/usaha pribadi.



Pelatihan Otomotif yang dilakukan secara kelompok untuk setiap satuan pekerjaan.



Pelatihan menjahit diikuti oleh binaan perempuan.



Pelatihan keterampilan mebeleir juga dilakukan berkelompok untuk setiap satuan kegiatan.

Terkait dengan lamanya waktu pembinaan di PSBR Naibonat, Kepala seksi rehsos memberikan tanggapan:

“Kami pernah mengajukan usulan agar masa pembinaan diperpanjang menjadi 1 tahun jangan hanya 6 bulan, dengan dasar pemikiran bahwa apabila 1 tahun diberikan pembinaan, dianggap sudah cukup menguasai teknik keterampilan yang diberikan. Daya serap penerimaan materi pada anak-anak, berbeda satu sama lain. Anak-anak yang dari desa yang jauh dari kota, 6 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Pelatihan yang penuh yang bisa diberikan hanya 4 bulan sementara waktu lainnya dihabiskan untuk kegiatan/ bimbingan sosial. Tetapi usulan itu tidak pernah dipenuhi. Mental anak-anak belum siap ketika keluar panti dibekali dengan toolkit (harus mengelola toolkit sendiri) pada akhirnya toolkit yang diberikan tidak bisa digunakan karena pada dasarnya mereka belum siap dilepas. Apalagi ketika di panti, mereka melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-temannya (per kelompok), tetapi ketika keluar mereka harus bekerja sendiri”.

Selain bimbingan keterampilan, para binaan diberikan juga bimbingan mental spiritual keagamaan yang dilaksanakan setiap hari oleh petugas dari dalam dan luar panti. Juga ada bimbingan etika dan budi pekerti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk sikap mental yang kuat, berperilaku baik sesuai dengan norma dan memberikan pemahaman yang komprehensif menyangkut konsepsi agama yang diharapkan bisa dijadikan pedoman binaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada satu kegiatan yang dilakukan setiap tahun, yaitu *outbond* di alam terbuka. Tidak seperti tahun-tahun lalu, tahun ini *outbond*

dilaksanakan di luar kabupaten. Di tengah cuaca yang dingin dan berkabut di sekitar bulan mei, PSBR Naibonat melaksanakan kegiatan *Outbond*. Tempat pelaksanaan yang biasanya di dalam kabupaten/kota Kupang kali ini dilaksanakan di kabupaten TTS, kabupaten yang terkenal akan cuaca dinginnya tepatnya di kota Soe yang berjarak sekitar 120 km dari PSBR Naibonat. Kegiatan ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan di antaranya: pertandingan persahabatan Unit Layanan Sepak Bola dengan Tim Sepak bola junior kabupaten TTS, pertandingan persahabatan Voli tim Regular putra dan putri PSBR Naibonat dengan tim Voli putra dan putri SMKN 2 Kota Soe dan kegiatan pentas seni rakyat. Tujuan kegiatan ini bukan hanya mencari kemenangan dalam pertandingan tapi lebih untuk mempererat kebersamaan dan persahabatan antara PSBR Naibonat dengan masyarakat sekitar khususnya anak dan remaja di kabupaten TTS selain itu untuk menambah kepercayaan diri penerima manfaat dengan pertandingan persahabatan dan tampil di depan ratusan masyarakat dalam kegiatan pentas seni rakyat.

Bimbingan sosial diberikan dalam bentuk ceramah, bimbingan individu dan bimbingan kelompok. Sedangkan materi bimbingan meliputi: pendidikan pancasila, kewirausahaan, etika sosial, kepemimpinan, kesehatan bagi remaja, bimbingan hidup bermasyarakat dan dinamika kelompok. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari, setelah istirahat siang. Sedangkan pelaksana bimbingan sosial adalah pekerja sosial fungsional dan petugas panti lainnya.

Perilaku binaan terus diamati oleh petugas yang mendampingi mereka selama mengikuti kegiatan. Apakah binaan serius atau tidak dalam mengikuti kegiatan; atau

ada/tidak keingintahuan untuk belajar; atau hanya asal ikut kegiatan saja. Terlihat dari bagaimana mereka bekerjasama dengan teman-teman dalam kelompoknya. Di sini bisa diartikan tujuan keberfungsian sosial tercapai atau tidak. Hal inipun bisa dilihat dalam kehidupan di asrama. Ketika kembali ke masyarakat dan anak itu bisa berubah dari kondisi sebelum dibina berarti keberfungsian sosial tercapai.

Pengamatan di dalam panti dilakukan oleh petugas panti, pendamping, pengasuh asrama, pendamping keterampilan, instruktur, piketnya. Juga kepala seksi rehsosnya. Sementara pekerja sosial setelah bimbingan keterampilan, dia membina anak-anak setelah usai kegiatan. Sedangkan sore dan malam hari tugas diambil alih oleh pengasuh dan petugas Piket pagi dan malam. Pagi harinya ketika masuk kelas diserahkan kepada pendamping dan instruktur.

Untuk menunjang proses kinerja pelayanan dan bimbingan, PSBR Naibonat memiliki sejumlah pegawai yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing, dengan susunan pegawai sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	2	2	4
2.	SLTP	-	-	-
3.	SMU	5	2	7
4.	Diploma	2	5	7
5.	Strata 1	17	8	25
6.	Strata 2	3	-	3

Sumber: *Profil UPT Bina Remaja Naibonat, 2011*

Dari data tersebut terlihat bahwa tenaga yang paling banyak di panti ini berada pada tingkat pendidikan S1. Terkait dengan program rehabilitasi, staf seksi rehabilitasi sosial ada 9 orang. Mereka bertugas jaga piket bergantian satu hari 1 orang. Mereka juga bertugas sekaligus sebagai

pendamping binaan. Instruktur dari luar, diambil dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan jenis keterampilan yang diberikan. Pengasuh juga bisa melakukan pekerjaan piket bila saat bertugas. Ironisnya, tenaga pekerja sosial yang ada di panti ini hanya ada 1 orang. Menurut petugas di sana, sulit mengajukan usulan jabatan fungsional pekerja sosial. Ada 2 orang staf di panti ini yang sudah mengusulkan untuk menjadi fungsional pekerja sosial sejak dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum disetujui usulannya. Mereka mengatakan apabila tidak disetujui usulannya, maka mereka akan mengajukan jabatan fungsional lain, apakah itu sebagai fungsional perencana, atau sebagai peneliti.

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang bertujuan menggali potensi bakat dan minat binaan dalam berbagai bidang sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki panti. Sesuai dengan ketersediaan fasilitas PSBR Naibonat, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Bidang kesenian seperti band, rebana, organ tunggal, seni tari dan vokal, sertakomputer. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu.

Setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan, yang merupakan tugas dan fungsi dari seksi rehabilitasi sosial, data anak dan sekaligus pembinaannya diserahkan kepada seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS). Ini menjadi tahap pasca pelayanan (terminasi dan bimbingan lanjut) yang merupakan akhir pelayanan selama berada di panti. Kegiatan-kegiatannya meliputi: bimbingan hidup bermasyarakat, evaluasi semua materi bimbingan sosial dan keterampilan, penutupan kegiatan secara resmi, pemberian toolkit, pemulangan binaan ke daerah asal, dan bimbingan lanjut.

“Kami berharap remaja yang telah

mengikuti pelatihan bisa tuntas dan menguasai betul keterampilan. Sehingga, kelak setelah lulus, selain bisa bekerja secara mandiri, juga bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman lain di desanya atau tempat asalnya, khususnya bagi remaja yang belum memiliki pekerjaan. Harapannya bisa turut mengurangi angka pengangguran,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PSBR Naibonat.

5. Bimbingan Lanjut oleh PSBR Naibonat

Menurut informasi yang diperoleh, kegiatan akhir dari pelayanan binaan dalam pantiberupa kegiatan evaluasi dalam bentuk ujian teori dan praktek sesuai jenis keterampilan yang diikuti. Biasanya setelah berakhirnya masa pembinaan dilakukan acara penutupan secara resmi yang penyelenggaraannya diadakan di aula panti. Acara tersebut dihadiri oleh kepala dan seluruh staf PSBR serta seluruh binaan. Dalam kegiatan ini juga diserahkan toolkit yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal awal bagi eks binaandalam membuka usaha. Selang setahun keluar dari panti, pihak panti melakukan bimbingan lanjut kepada eks binaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memantau perkembangan binaan setelah dalam jangka waktu tertentu kembali ke keluarga/masyarakat.

Pembinaan/bimbingan lanjut sebenarnya dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, tergantung pada kebutuhan masing-masing eks binaannya dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian proses pelayanan sosial, serta tidak dapat dianggap sebagai modalitas treatment yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah binaan menjalani program rehabilitasi primer di panti rehabilitasi, mereka masih

memerlukan perawatan atau bimbingan lanjutan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung lancar. Pada kenyataannya *treatment* tidak berhenti di dalam panti sosial melainkan terus berlanjut sampai binaan kembali ke masyarakat, mampu mengembangkan gaya hidup yang sehat dan menjadi manusia yang produktif. Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP Mensos R.I. no. 56/HUK/2009, adalah serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kondisi kehidupan eks binaan setelah selesai menjalani Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di panti. Kegiatannya bisa berupa mengembalikan eks binaan kepada keluarga; mengembangkan kewirausahaan; menyalurkan ke dunia usaha; dan mengembalikan ke dunia pendidikan. Namun dalam kenyataannya, dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa bimbingan lanjut dipahami sebagai monitoring dan evaluasi, juga dimaksudkan sebagai upaya memberi motivasi kepada aparat desa dan sekaligus melaporkan hasil pelayanan panti ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota terkait. Menurut keterangan yang diperoleh dari petugas panti, hal ini dilakukan sebagai bukti jangan sampai kabupaten/kota mengirim anak yang tidak ada manfaatnya, sehingga hasil pelayanan tidak dapat terlihat. Panti berharap Dinas Sosial Kabupaten sekaligus ikut memantau calon binaan yang dikirimnya ke panti.

Sementara secara ideal Woodside dan McClam (2003), menyatakan bahwa keberlanjutan pelayanan diartikan sebagai 1). pelayanan yang diberikan pada klien tidak terputus dari tahap awal sampai terminasi dan keberlanjutannya; dan 2). penyediaan layanan secara komprehensif. Didalamnya termasuk intervensi dengan dukungan dari lingkungan, memelihara hubungan dengan keluarga klien dan pihak-pihak lain dan

jejaring sosial yang menghubungkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Sifatnya lebih menyeluruh dengan melibatkan unsur-unsur terkait yang berada di lingkungan keberadaan eks binaan. Dalam kenyataannya, PSBR Naibonat memahami bimbingan lanjut sebagai evaluasi yang hanya menggunakan pedoman dan instrumen wawancara, itupun lebih ditujukan kepada Dinas Sosial dimana eks binaan berasal, tidak langsung berhubungan dengan eks binaan. Hal ini sangat disayangkan. Terkait dengan instrumen yang digunakan, Kepala Seksi PAS mengatakan: *"Sebenarnya instrumen yang digunakan itu adalah instrumen monitoring evaluasi, yang padahal di tahun ini pula juga ada kegiatan monitoring evaluasi selain bimbingan lanjut. Seharusnya monitoring evaluasi dulu dilakukan, baru melakukan bimbingan lanjut untuk lebih memantapkan program pengembangan usaha eks binaan. Kegiatan ini sekaligus juga untuk mengetahui apakah metode pelayanan yang diberikan panti sudah sesuai dengan kebutuhan, termasuk jumlah jam pelayanan yang diberikan kepada binaan"*. Menurutnya, memang bimbingan lanjut yang dilakukan selama ini sifatnya masih monitoring.

Menjadi beban yang cukup berat bagi PSBR, dengan pemberian pelatihan selama 6 bulan tapi dituntut hasil yang optimal dengan harapan binaan langsung bisa membuka usaha sendiri. Seperti dikatakan oleh Dinas Sosial Kota Soe: *"apakah PSBR bisa memberikan bimbingan keterampilan lanjutan karena dari informasi yang diperoleh dari eks binaan, keterampilan yang diberikan selama 6 bulan masih dianggap kurang memadai bagi mereka untuk langsung memiliki/buka usaha"*.

Memang hal ini juga diakui oleh Kepala Seksi Rehsos: *"Anak-anak yang pernah dibina di sini umumnya kurang kritis atau kurang motivasi sehingga kegiatan yang diperoleh di panti tidak bisa dikembangkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Tidak ada usaha untuk bekerja mencari penghasilan"*.

Bimbingan lanjut untuk tahun ini dilakukan pada tanggal 5-14 Maret 2012 yang ditujukan kepada eks binaan angkatan kedua tahun 2010 dan angkatan pertama 2011. Kegiatan ini dilaksanakan selama seminggu atau tergantung jauh atau dekatnya lokasi yang dikunjungi. Ada perbedaan program untuk kedua angkatan tersebut. Eks binaan angkatan kedua tahun 2010 mendapatkan program pengembangan usaha, tapi untuk eks binaan angkatan pertama tahun 2011 tidak ada lagi program pengembangan usahanya. Hal ini terkait dengan sistem anggaran yang berlaku pada tahun 2011 yang lalu, dimana ada pengalokasian pemanfaatan anggaran.

Untuk tahun 2012 kegiatan bimbingan lanjut dilakukan di 12 kabupaten (dari 11 kabupaten untuk tahun 2010 dan 12 kabupaten untuk tahun 2011). Lokasi ini dipilih dari kabupaten yang sama untuk dua tahun angkatan, namun berbeda eks binaannya. Hal ini juga disesuaikan dengan besarnya alokasi anggaran yang tersedia untuk program bimbingan lanjut tersebut. Lokasi yang terpilih adalah kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Sikka, Ngada, Lembata, Sumba Timur, Belu, Timor Tengah Utara, kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Jumlah petugas yang melaksanakan bimbingan lanjut ini sebanyak 12 orang, terdiri dari pegawai TU, pegawai pada seksi rehabilitasi sosial dan seksi PAS serta dikoordinir oleh seksi PAS.

Tampaknya perjalanan untuk melaksanakan bimbingan lanjut ini cukup menyulitkan bagi petugas panti, sebab umumnya tempat tinggal binaan berada di daerah yang sulit dijangkau oleh alat transportasi. Apalagi ditambah dengan tidak ditemukannya eks binaan di alamat tersebut. Tidak semua eks binaan bekerja dan menetap di tempat asal. Diantaranya sudah ada yang bekerja di salon di Bali, Surabaya, atau ada juga yang merantau ke luar kota.

Tidak semua laporan bimbingan lanjut yang disusun oleh petugas, bisa diperoleh peneliti karena belum semua petugas menyerahkan laporannya kepada seksi PAS. Namun dari beberapa informasi yang diperoleh, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: 1). Pihak aparat desa umumnya mendukung kegiatan eks binaan, terutama pembentukan kelompok usaha bersama; 2). Sertifikat otomotif yang diperoleh dari hasil pembinaan di panti dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan sebagai mekanik dan sebagai nakhoda pada kapal pesiar; 3). Keterampilan otomotif dapat digunakan untuk membuka bengkel motor dan tukang ojeg; 4). Untuk binaan wanita yang mendapatkan keterampilan menjahit, secara berkelompok membuka usaha jahit dan bordir; 5). Untuk binaan yang memperoleh keterampilan pertukangan/mebeleur, bekerja pada perusahaan mebel yang cukup maju.

Eks binaan yang kebetulan bertempat tinggal berdekatan, dapat memanfaatkan toolkit yang diberikan untuk membuka usaha bersama. Pemberian toolkit disesuaikan dengan perekrutan binaan di awal dan diberikan secara berkelompok. Biasanya setiap kabupatendiambil beberapa anak misalnya, ada anak yang memilih

keterampilan perbengkelan dan ada yang menjahit, tentunya dibedakan antara angkatan 2010 dan 2011 meskipun berada di kabupaten yang sama. Kelompok laki-laki dengan usaha membuka bengkel dan anak-anak wanita dengan usaha menjahit. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-4 anak. Tampaknya dari beberapa kasus kelompok perbengkelan, yang sempat didatangi oleh peneliti, tidak semua anggota kelompok bekerja di bengkel pd waktu bersamaan. Ada yang mempunyai pekerjaan lain dan siangnya melanjutkan kerja di bengkel. Begitupun dengan kelompok menjahit. Tidak semua anggota kelompok bisa bergabung dalam satu tempat kerja. Pekerjaan bisa dibagi untuk penyelesaiannya dan ada yang bekerja secara bersama.

Ada beberapa catatan petugas, terkait dengan temuan hasil bimbingan lanjut tersebut, yaitu: 1). Lokasi geografis yang sulit dengan jarak tempat tinggal yang berjauhan, menyebabkan eks binaan susah untuk bergabung dalam kelompok usaha bersama; 2). Kelompok usaha otomotif tidak dapat bertahan lama atau bubar karena toolkit yang diberi berupa kunci-kunci tidak dapat digunakan (drat/baut longgar); 3). Tidak ada modal untuk membeli peralatan yang baru; 4). Kepercayaan masyarakat terhadap hasil usaha eks binaan, masih kurang sehingga tidak ada konsumen; 5). Eks binaan menjahit, kurang percaya diri untuk membuka usahanya sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh petugas ketika melakukan bimbingan lanjut adalah menyarankan kepada pekerja sosial yang ada di dinas sosial kabupaten agar memberikan motivasi kepada eks binaan untuk lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya, dan untuk eks binaan yang dianggap mampu untuk

melanjutkan usahanya dengan membentuk kelompok, disarankan untuk mengajukan proposal bantuan permodalan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Nakertrans yang ada di wilayahnya. Petugas panti

melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial di kabupaten yang bersangkutan dan menyarankan agar proposal eks binaan PSBR Naibonat mendapat perhatian.

Kasus - Perkembangan Usaha Eks Binaan:

Nur diberi bantuan (toolkit) ketika keluar dari panti berupa 1 buah mesin jahit yang ditaruh ditempat sekarang dia membuka usaha. Sebenarnya bantuan itu diberikan untuk digunakan bersama teman-teman kelompok dari desa yang sama. Ada 5 orang yang bergabung dengan Nur, tetapi hingga saat ini mereka tidak pernah datang dan mesin jahit digunakan oleh Nur untuk melanjutkan usahanya. Hingga sekarang usaha Nur semakin berkembang. Dia mampu menyewa ruang di pasar, memberikan kursus menjahit kepada masyarakat yang dilakukan di ruang usahanya itu. Untuk pengembangan usaha, setiap eks binaan diminta untuk membuat proposal untuk mengajukan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Pada tanggal 5 mei 2012 Nur memperoleh bantuan lagi dari PSBR Naibonat berupa mesin bordir. Ini diberikan karena melihat usahanya berhasil dan Nur masih tetap melakukan hubungan baik dengan PSBR hingga saat ini. Ia juga masih sering dikunjungi oleh pihak panti maupun Dinas Sosial untuk monitoring usahanya.

Penghasilan dari menjahit tidak bisa dia hitung karena langsung terpakai untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Untuk sewa ruang dia harus membayar sebesar Rp. 135.000,- setiap bulan. Juga digunakan untuk transport, dan makan sehari-hari selama ia berada di kios jahit.

Kendala selama pelatihan di PSBR: banyak binaan yang dibina di panti sehingga instruktur tidak bisa membagi perhatian kepada individu-individu binaan, sementara itu waktu pelatihannya juga singkat. Pada akhirnya dia hanya bisa menerima kondisi apa adanya. Sewaktu Nur masih di panti, dalam satu kelas menjahit ada sejumlah 30 binaan (laki-laki dan perempuan).

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kondisi kemiskinan yang dialami keluarga di NTT menjadi peluang bagi PSBR Naibonat untuk memberi alternatif pendidikan yang tidak hanya bisa dilakukan melalui bangku sekolah. Pendidikan non formal melalui bimbingan keterampilan, mental dan sosial dianggap mampu membekali mereka untuk terjun ke masyarakat bersaing dalam dunia usaha. Namun sayangnya, program yang sangat bagus hanya dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan anggaran yang terbatas. Membina manusia kreatif dan dapat bersaing dalam dunia kerja tidak cukup hanya dalam waktu

6 bulan. Apalagi jika dalam waktu terbatas tersebut, harus terbagi lagi dengan berbagai kegiatan yang sifatnya penanaman mental spiritual, ditambah lagi dengan jumlah binaan yang terlalu besar untuk pengajaran di setiap satuan kegiatan.

b. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan dengan fasilitas sarana prasarana diupayakan seoptimal mungkin oleh pihak panti, tentunya juga dengan memikirkan kebutuhan dan budaya lokal para binaannya. Hal ini terlihat dari pemberian toolkit yang berkelompok dan sesuai dengan yang dibutuhkan binaan dan kondisi tempat tinggal. Hanya sayangnya lagi, faktor geografis tidak pernah menjadi bagian

pertimbangan sistem anggaran yang ada, menyamaratakan alokasi anggaran untuk seluruh wilayah nusantara tanpa memikirkan kesulitan jangkauan dan kemudahan transportasinya.

- c. Pemahaman terhadap bimbingan lanjut yang seharusnya sebagai mata rantai pembinaan yang tidak terputus, menjadi terpisah dan dianggap selesai pelayanan. Bimbingan lanjut dipahami sebagai monitoring evaluasi, sehingga instrumen yang digunakan masih bersifat pemantauan dan itupun ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten dimana anak itu berasal. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua eks binaan diberikan bimbingan lanjut dan terjadi pemilahan kemudahan jangkauan lokasi ketika melaksanakan bimbingan lanjut. Petugas yang melakukan bimbingan lanjut itupun tidak dipertimbangkan kapasitasnya sebagai pembimbing dan fungsional pekerja sosial, tetapi lebih bersifat pemerataan untuk semua struktur yang ada di panti.

2. Rekomendasi

- a. Pelayanan berbasis masyarakat (*community-based services*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Paradigma pelayanan berbasis masyarakat ini dipicu oleh demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mau tak mau kesejahteraan sosial masyarakat harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Sebagai implikasinya, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Ada kerjasama warga

untuk memikirkan anak-anak putus sekolah di lingkungannya dengan pemerintah. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program layanan.

- b. Seharusnya sebelum dilakukan bimbingan lanjut, diadakan dahulu monitoring evaluasi baru kemudian dilakukan bimbingan lanjut. Ini untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pelayanan yang telah diberikan. Apakah mereka bisa buka usaha atau tidak. Disinilah kemudian dilakukan binjut atau bimbingan pemantapan kepada mereka yang telah berhasil menerapkan ilmu/keterampilan yang telah diperolehnya di panti. Setelah itu ada bantuan usaha ekonomis produktif atau dapat dikatakan sebagai pengembangan usaha.
- c. Lamanya dilakukan bimbingan lanjut, seharusnya juga menjadi pertimbangan. Apakah setahun setelah proses layanan bisa langsung dibinjut atau 6 bulan. Sehingga pada masa itu petugas binjut masih bisa bertemu dengan eks binaan dan melihat perkembangan mereka.
- d. Pengembangan usaha diperlukan ketika binjut sudah dilaksanakan.
- e. Bimbingan lanjut untuk PSBR Naibonat dalam kenyataannya harus memiliki pedoman baku yang dibedakan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, karena terkait dengan masa depan remaja kita bahkan masa depan bangsa. Di dalam pedoman tersebut dicantumkan beberapa hal, yaitu:
 - 1) Terkait dengan kriteria binaan binaan (hal ini sebagai ketegasan kriteria proses penerimaan binaan panti), termasuk usia diterima sebagai binaan secara tegas. Tidak

- meloloskan anak yang usianya sudah tidak remaja lagi meskipun punya keinginan kuat untuk pengembangan dirinya.
- 2) Ada ketegasan koordinasi panti dengan instansi terkait termasuk Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan batasan kewenangannya. Koordinasi dimulai sejak tahap perencanaan hingga bimbingan lanjut dan terminasi. Bila diperlukan dibuat semacam kesepakatan atau Surat Keterangan Bersama pelaksanaan kegiatan, apalagi bila bisa menerapkan pelayanan berbasis masyarakat (*community-based services*), hal ini sangat diperlukan.
 - 3) Langkah-langkah pelaksanaan bimbingan lanjut, dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan ini serta pembagian peran/tugas secara tegas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
 - 4) Pelaksanaan bimbingan lanjut mengikuti prosedur kerja dalam panti dan penanganannya untuk menjamin kepastian terlayannya para pengguna pelayanan secara baik.
 - 5) Ada indikator keberhasilan eks binaan sehingga dia perlu memperoleh bantuan pengembangan usaha.
 - 6) Pemberian pelatihan penyesuaian kerja: menitikberatkan pada binaan yang setelah memperoleh pelatihan vokasional awal belum siap untuk berkompetisi di masyarakat. Eks binaan dilatih kembali untuk memperoleh keterampilan kerja yang baik dan perilaku yang tepat dalam bekerja.
 - 7) Ada ketegasan waktu dilaksanakannya bimbingan lanjut.
 - 8) Perencanaan anggaran untuk program bimbingan lanjut perlu disesuaikan dengan jumlah binaan binaan dan menjangkau hingga ke lokasi eks binaan.
 - 9) Instrumen bimbingan lanjut harus tersedia dan baku (ada standar).
 - 10) Pelaporan bimbingan lanjut didokumentasikan yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk program layanan berikutnya.
- f. Melakukan kajian yang lebih dalam, terkait dengan alur tahapan pelayanan untuk jenis-jenis panti yang berbeda dan karakteristik panti sesuai dengan jenis permasalahannya untuk menentukan program kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abied, (2009). *Faktor Penyebab Putus Sekolah*, dalam www.masbied.com/2009/10/30/faktor-penyebab-putus-sekolah
- Apolonius Dua Wea, (2011). *Tingkat Pendidikan Formal di NTT, Memprihatinkan*, dalam Kupang: NTT online, jumat 04 November 2011 23:17
- Badan Pusat Statistik, (2009). *Kupang Timur dalam Angka*, Kabupaten Kupang: BPS.
- Du Bois, B. & Miley, K.K., (2005). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gunarsa, Y. Singgih D. & Gunarsa, Singgih D., (1980). *Psikologi Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hurlock, Elizabeth B., (1973). *Adolescent Development*, Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha Ltd.

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 40/HUK/2004 tentang Prosedur Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial R.I.
- PP Mensos R.I. no. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Khaeruddin, (2003). *Ilmu Pendidikan Islam*. Makassar: CV. Berkah Utami, hal.2.
- Retnowati, Sofia. *Remajadan Permasalahannya*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi.
- Nurdin Widodo, dkk, (2009). *Studi Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui Panti Sosial Bina Remaja*. Jakarta: P3KS Press .
- Zastrow, Charles, (2003). *The Practice of Social Work* (7th ed). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, No: 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.